SCRIPTA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Vol.7. No. 4 Oktober – Desember, 2025
Hal. 169 - 182
https://doi.org/10.33019/c0fw5m75
ISSN: 2656-9809 (Online)
https://scripta.ubb.ac.id/index.php/scripta/en

INSTRUMENTASI ISU-ISU PEREMPUAN DALAM KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN TERPILIH DI KABUPATEN BELITUNG

Intan Purnama Sari
Universita Bangka Belitung
Email: intanfisip0105@gmail.com
Universitas Bangka Belitung
Ibrahim
Universitas Bangka Belitung
Email: iimbabel@yahoo.com
Irvan Ansyari
Universitas Bangka Belitung
Email: irvan@ubb.ac.id

Abstrak

Isu prempuan dalam politik sangat penting untuk diperhatikan, karena keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang intensitas calon anggota legislatif perempuan terpilih di Kabupaten Belitung dalam mengangkat isu-isu perempuan serta bagaimana calon anggota legislatif perempuan memobilisasi isu-isu perempuan dalam strategi kampanye mereka. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Ekofenimisme dari Vandana Shiva (1997). Hasil penelitian menunjukkan bahwa caleg perempuan secara konsisten membawa isu-isu yang berakar pada pengalaman hidup perempuan, seperti pemberdayaan ekonomi rumah tangga, perlindungan anak dan perempuan, kesehatan ibu-anak, serta partisipasi politik berbasis komunitas. Temuan lapangan menunjukkan bahwa strategi mobilisasi dilakukan melalui pendekatan naratif yang otentik, kampanye tatap muka, dan forum komunitas yang melibatkan perempuan secara langsung. Pendekatan ini efektif membangun kedekatan emosional, meningkatkan elektabilitas kandidat, serta menggeser persepsi tradisional tentang peran perempuan dalam politik lokal. Mobilisasi berbasis komunitas ini membuktikan bahwa isu-isu perempuan dapat menjadi instrumen politik yang konkret dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dengan menggunakan perspektif ekofeminisme Vandana Shiva, penelitian ini mengungkap bahwa perjuangan caleg perempuan di Belitung tidak hanya terkait dengan isu kesetaraan gender, tetapi juga dengan keberlanjutan hidup, keadilan sosial, dan kemandirian komunitas. Pendekatan yang menekankan nilai empati, solidaritas, dan keberlanjutan memperlihatkan bahwa politik perempuan mampu menghadirkan alternatif yang lebih inklusif dan berakar pada realitas lokal.
Kata Kunci : Isu Perempuan, Ekofeminisme, Legislatif, Politik.

Abstract

Women's issues in politics are crucial to address, as women's involvement in political decision-making can lead to policies that are more responsive to societal needs. This study examines the extent to which elected female legislative candidates in Belitung Regency emphasize women's issues and how they mobilize these issues within their campaign strategies. This research uses a qualitative approach, utilizing both primary and secondary data. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation. The theoretical framework applied is Vandana Shiva's (1997) Ecofeminism theory. The results revealed that female candidates consistently advocated for issues rooted in women's lived experiences, such as household economic empowerment, protection for women and children, maternal and child health, and community-based political participation. Field findings indicated that mobilization strategies were carried out through authentic narrative approaches, face-to-face campaigning, and community forums that directly involve women. These approaches effectively built emotional connections, enhanced candidate electability, and shifted traditional perceptions of women's roles in local politics. Such community-based mobilization demonstrated that women's issues could serve as concrete political instruments relevant to everyday societal needs. Using Vandana Shiva's ecofeminist perspective, this study shows that the struggles of female candidates in Belitung are not solely related to gender equality issues but also encompass broader concerns such as sustainability, social justice, and community self-reliance. An approach emphasizing empathy, solidarity, and sustainability illustrates that women's political participation can offer a more inclusive alternative grounded in local realities.
Keywords: *Women's Issues, Ecofeminism, Legislative,*

PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam politik di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, tantangan yang dihadapi masih sangat signifikan. Pada Pemilu Legislatif 2019, persentase perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hanya mencapai 20,8% (Lestari Moerdijat, 2024). Di tingkat DPRD, meskipun terdapat variasi antar daerah, sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota masih mencatatkan angka keterwakilan perempuan di bawah 30%. Di Kabupaten Belitung, misalnya, keterwakilan perempuan di DPRD juga masih tergolong rendah, mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam mencapai kesetaraan gender di arena politik.

Isu perempuan dalam politik penting untuk diperhatikan, karena keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya penting dari segi jumlah, tetapi juga dari segi kualitas partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Menurut International IDEA, "Kualitas partisipasi perempuan di dalam politik juga perlu dihargai dengan mengubah persepsi tentang kekuasaan dan dengan menggugurkan persepsi usang bahwa kehidupan publik (politik) merupakan wilayah dominasi laki-laki" (International IDEA, 2002). Kehadiran perempuan dalam politik

membawa perspektif yang berbeda dan lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan publik. “Kebijakan yang melibatkan perempuan dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan cenderung lebih memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial” (Farida, 2020). Dengan demikian, meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya merupakan keharusan moral, melainkan juga langkah strategis menuju pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks kampanye politik, calon legislatif di Indonesia menggunakan berbagai strategi untuk menarik dukungan pemilih, salah satunya dengan mengangkat isu-isu perempuan. Namun, isu ini masih sering dipandang sebagai isu sekunder dalam kampanye, sehingga belum sepenuhnya menjadi prioritas politik. Jika isu perempuan hanya dijadikan sebagai alat kampanye tanpa tindakan nyata, maka perubahan yang diharapkan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak perempuan yang terlibat dalam politik agar suara mereka lebih didengar dan kebijakan yang berpihak pada perempuan dapat benar-benar diwujudkan.

Di Kabupaten Belitung, keterwakilan perempuan dalam DPRD menunjukkan dinamika yang menarik. Pada periode 2014–2019 tidak ada satupun perempuan yang berhasil masuk ke DPRD, menggambarkan kuatnya sistem patriarki di tingkat lokal. Partai politik cenderung lebih memprioritaskan laki-laki, sementara perempuan menghadapi hambatan struktural serta stigma sosial yang masih menganggap politik sebagai dunia laki-laki. Minimnya dukungan partai maupun masyarakat turut mempersempit peluang perempuan untuk terpilih. Pada periode 2019–2024, meskipun terdapat peningkatan, hanya tiga perempuan yang berhasil duduk di DPRD, semuanya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih jauh dari harapan.

Pemilu 2024 membawa perkembangan baru di Kabupaten Belitung dengan terpilihnya tiga perempuan sebagai anggota DPRD periode 2024–2029, yakni Vina Cristyn Ferani (Dapil Belitung II), Yola Junita (Dapil Belitung II), dan Ferliza (Dapil Belitung I) (Nazriel, 2024). Salah satu yang menjadi sorotan adalah Vina Cristyn Ferani yang berhasil terpilih sebagai perempuan pertama Ketua DPRD Kabupaten Belitung. Keberhasilannya didukung oleh pengalaman politik, kemampuan kepemimpinan, strategi kampanye dialogis, serta dukungan tim sukses yang solid. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dalam peran perempuan di politik lokal, sekaligus mencerminkan meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.

Namun demikian, tantangan besar tetap dihadapi, terutama faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik di Kabupaten Belitung. Budaya patriarki yang masih dominan membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik. Kurangnya pendidikan politik dan hambatan struktural dalam partai politik menambah kesulitan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif. Implementasi kebijakan afirmatif berupa kewajiban kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif memang menjadi langkah maju, tetapi realitas menunjukkan bahwa perempuan masih sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik, baik di legislatif maupun eksekutif.

Dalam hal ini, Pemilu 2024 di Belitung menjadi contoh menarik bagaimana kuota perempuan tidak hanya soal angka, tetapi juga menyangkut kualitas kepemimpinan dan pengaruh perempuan dalam politik. Keberhasilan beberapa perempuan menduduki jabatan strategis membuktikan bahwa dengan dukungan yang tepat, perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan politik yang lebih inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana isu-isu perempuan diangkat dalam kampanye, baik melalui strategi komunikasi, pesan politik, maupun media yang digunakan.

Kajian tentang bagaimana calon anggota legislatif perempuan menginstrumentasikan isu perempuan dalam kampanye di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Belitung, masih tergolong minim. Padahal, penelitian mengenai pola komunikasi politik yang digunakan caleg perempuan dalam mengangkat isu-isu perempuan dapat memberikan gambaran sejauh mana komitmen politik terhadap isu gender tercermin dalam kontestasi politik daerah. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis instrumentasi isu-isu perempuan dalam kampanye calon anggota legislatif perempuan terpilih di Kabupaten Belitung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial berdasarkan data empiris (Yuliani, 2018). Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji instrumentasi isu-isu perempuan dalam kampanye calon anggota legislatif perempuan terpilih di Kabupaten Belitung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi relevan (Akhmad, 2015). Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif, antara lain anggota DPRD perempuan periode 2024–2029,

pimpinan partai politik, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat, serta masyarakat umum. Observasi digunakan untuk melihat langsung dinamika politik dan interaksi caleg perempuan dengan partai maupun masyarakat, sedangkan dokumentasi berupa arsip resmi, media, foto, dan literatur terkait berfungsi memperkuat temuan lapangan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Belitung karena wilayah ini memiliki karakteristik sosial dan budaya yang menarik dalam konteks politik lokal, khususnya terkait keterwakilan perempuan di legislatif. Belitung dipilih juga karena pada periode 2024–2029 terdapat tiga perempuan yang berhasil duduk di DPRD, bahkan satu di antaranya menjabat sebagai Ketua DPRD, sehingga memberikan kasus yang signifikan untuk diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, media massa, laporan resmi, dan sumber-sumber literatur lainnya yang relevan dengan substansi penelitian (Sugiyono, 2019). Dengan kombinasi ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai strategi caleg perempuan dalam mengangkat isu gender dalam kampanye.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Mudzanatun & Putri, 2020). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan sesuai fokus penelitian, penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk naratif maupun visual agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan pola, hubungan, serta perbedaan yang ditemukan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode (Patton, 2002), sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan, strategi, serta kontribusi perempuan dalam memperjuangkan keterwakilan politik di Kabupaten Belitung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Intensitas Isu Perempuan oleh Caleg Perempuan Terpilih di Kabupaten Belitung

Keterwakilan perempuan dalam politik lokal Kabupaten Belitung pada Pemilu 2024 tidak hanya dapat dipahami sebatas keterpenuhan regulasi kuota 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, melainkan juga mencerminkan upaya nyata untuk mengartikulasikan isu-isu substantif yang berkaitan

dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Hal ini memperlihatkan pergeseran dari representasi deskriptif (*descriptive representation*) menuju representasi substantif (*substantive representation*) sebagaimana dipaparkan oleh Phillips (1995), yaitu keterwakilan yang tidak hanya menekankan kehadiran perempuan secara numerik, tetapi juga memastikan adanya pengarusutamaan gender dalam agenda politik. Dengan demikian, isu-isu perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai elemen simbolik, melainkan sebagai strategi politik yang berfungsi untuk memperluas basis dukungan sekaligus memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, terdapat tiga isu utama yang secara konsisten diangkat oleh calon legislatif (caleg) perempuan terpilih, yaitu: (1) pemberdayaan ekonomi perempuan, (2) pendidikan dan perlindungan anak, serta (3) partisipasi politik perempuan. Pertama, isu pemberdayaan ekonomi perempuan dipandang strategis karena terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari mayoritas konstituen. Vina Cristyn Ferani (PDI Perjuangan) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong kemandirian perempuan melalui wadah *Belitung's Women Club*. Forum ini bukan hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga sarana advokasi dan pemberdayaan UMKM perempuan. Hal ini sejalan dengan sebuah konsep dari Kabeer (2012) tentang pemberdayaan, di mana perempuan tidak hanya memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga mengembangkan kapasitas untuk mengambil keputusan serta mengontrol jalannya kehidupan mereka. Dukungan serupa datang dari Hastari Wardianti selaku Ketua TP-PKK Belitung, yang menegaskan bahwa penguatan ekonomi perempuan di tingkat rumah tangga akan memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara lebih luas.

Kedua, isu pendidikan dan perlindungan anak juga menjadi instrumen penting dalam kampanye caleg perempuan. Ferliza (Gerindra) menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penguatan posyandu, mencegah kekerasan terhadap perempuan, serta memperluas kerja sama dengan dinas sosial dan BKKBN. Narasi yang digunakan menekankan peran perempuan sebagai ibu sekaligus pelindung anak, sehingga membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Hal ini memperkuat citra caleg perempuan sebagai figur *ibu politik* (maternal politics), sebuah strategi yang juga diidentifikasi oleh Waylen (2007) sebagai salah satu pola legitimasi politik perempuan di banyak negara berkembang.

Ketiga, isu partisipasi politik perempuan dipandang sebagai agenda strategis untuk mengikis dominasi patriarki dalam ruang politik lokal. Ferliza dan Yola Junita (DPRD Belitung 2024–2029) menegaskan bahwa stigma sosial masih menjadi hambatan signifikan,

misalnya anggapan bahwa perempuan tidak layak memimpin atau tidak mampu menghadapi kompleksitas politik. Dalam konteks ini, strategi kampanye tidak hanya diarahkan pada konstituen laki-laki, melainkan juga pada kelompok perempuan itu sendiri agar mereka memiliki keberanian untuk berpartisipasi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *politics of life* Vandana Shiva, yang menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang politik adalah bagian dari perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Strategi penyampaian isu-isu tersebut sangat dipengaruhi oleh narasi dan framing politik. Mengacu pada teori framing Goffman (1971), cara isu dikemas akan menentukan bagaimana publik memaknai dan meresponsnya. Vina Cristyn Ferani, misalnya, menggunakan narasi keseharian terkait keresahan ibu-ibu terhadap harga sembako sebagai pintu masuk untuk membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Ferliza membingkai pengalaman pribadinya sebagai ibu rumah tangga sebagai simbol autentisitas dan keterhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, Yola Junita menggunakan framing kolektif dengan menekankan bahwa perempuan bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek yang mampu menjadi agen perubahan dalam pembangunan daerah. Narasi-narasi ini memperlihatkan bahwa caleg perempuan tidak hanya mengandalkan retorika, melainkan juga memanfaatkan pengalaman personal dan kedekatan kultural sebagai instrumen kampanye yang efektif.

Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan signifikan dalam mengangkat isu perempuan di ruang kampanye. Pertama, terdapat *trust deficit* di kalangan pemilih, di mana janji politik sering dianggap sebatas retorika tanpa realisasi nyata (Juniasi, wawancara 24 Juni 2025). Kedua, stigma kultural berbasis patriarki masih kuat, sehingga caleg perempuan kerap diposisikan inferior dibandingkan dengan kandidat laki-laki (Yola Junita, wawancara 7 Juli 2025). Ketiga, kendala teknis berupa keterbatasan waktu kampanye membuat diskusi substantif terkait isu perempuan sulit dilakukan secara mendalam (Vina Cristyn Ferani, wawancara 24 Juni 2025). Keempat, dukungan partai politik masih terbatas, di mana isu perempuan lebih sering dijadikan alat simbolik ketimbang diintegrasikan dalam platform politik resmi (Ketua Partai Gelora, wawancara 21 Juli 2025). Hambatan-hambatan ini menunjukkan adanya jurang antara komitmen personal caleg dengan dukungan institusional partai yang belum sepenuhnya memadai.

Analisis perbandingan terhadap tiga partai politik utama di Belitung memperlihatkan variasi dalam menginstrumentasi isu perempuan. PDI Perjuangan menunjukkan strategi

yang lebih sistematis dengan mengintegrasikan isu perempuan ke dalam ideologi partai, menyediakan pelatihan, mendukung pendanaan kampanye, serta melakukan pengawasan rutin terhadap kinerja caleg perempuan. Hal ini menjadikan isu perempuan sebagai bagian dari strategi partai, bukan sekadar inisiatif personal. Gerindra, di sisi lain, lebih bersifat pragmatis dengan mengikuti regulasi tanpa strategi afirmatif khusus. Dukungan partai bersifat minimal, sementara caleg perempuan lebih mengandalkan kedekatan emosional dan komunikasi personal dengan pemilih. Sementara itu, Partai Gelora menghadapi keterbatasan signifikan karena minim kader perempuan dan masih kuatnya budaya patriarki internal, meskipun terdapat wacana untuk mendirikan sekolah politik perempuan dan mendorong program afirmatif jangka panjang. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengarusutamaan isu perempuan tidak hanya bergantung pada kapasitas individual caleg, tetapi juga pada sejauh mana partai politik menyediakan ruang, dukungan, dan mekanisme kelembagaan yang berpihak pada keterwakilan perempuan.

Dengan demikian, intensitas isu perempuan yang diangkat oleh caleg perempuan terpilih di Kabupaten Belitung mencerminkan dinamika politik berbasis kehidupan (*politics of life*) yang digagas Vandana Shiva, di mana isu-isu substantif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat ditempatkan sebagai agenda utama. Narasi dan framing yang membumi berhasil membangun legitimasi politik dan kedekatan emosional dengan pemilih, meskipun tantangan berupa skeptisisme publik, stigma kultural, keterbatasan teknis, serta minimnya dukungan partai masih menjadi hambatan serius. Kesimpulan penting dari temuan ini adalah bahwa representasi perempuan di Belitung tidak berhenti pada aspek kuantitatif atau elektoral, melainkan telah bergerak menuju perjuangan substantif yang berorientasi pada keadilan sosial, inklusivitas gender, dan transformasi politik lokal.

Mobilisasi Isu-Isu Perempuan dalam Strategi Kampanye Calon Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Belitung

Mobilisasi isu-isu perempuan dalam kontestasi politik lokal di Kabupaten Belitung menjadi instrumen penting dalam memperkuat representasi substantif perempuan di ruang politik. Kampanye politik tidak hanya dipahami sebagai ajang memperkenalkan kandidat dan program kerja, melainkan juga sebagai sarana artikulasi isu-isu gender yang selama ini kurang mendapat ruang, mulai dari kesetaraan gender, kesehatan ibu-anak, hingga pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Para calon anggota legislatif (caleg) perempuan di Belitung berupaya menghadirkan kampanye yang membumi dengan mendekatkan diri pada

realitas sehari-hari perempuan, baik melalui tatap muka langsung (*door to door*) maupun pemanfaatan media sosial.

Hasil wawancara dengan caleg terpilih seperti Vina Cristyn Ferani, Yola Junita, dan Ferliza, tokoh masyarakat seperti Efendi, organisasi perempuan seperti PKK Kabupaten Belitung, hingga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu memperlihatkan bahwa strategi mobilisasi isu perempuan bersifat dinamis. Setiap kandidat membangun narasi yang berbeda untuk menjangkau konstituen perempuan. Isu-isu yang diangkat sering kali terkait dengan keresahan sehari-hari: harga sembako, layanan kesehatan, stunting, dan akses pendidikan. Strategi ini terbukti efektif membangun kedekatan emosional sekaligus menegosiasikan posisi perempuan dalam ruang publik yang masih dipengaruhi oleh norma patriarki.

Dalam kerangka teoritik, strategi komunikasi politik berbasis gender yang digunakan para caleg perempuan sejalan dengan yang disampikan oleh Mansbridge (1999) mengenai representasi deskriptif sebagai jembatan menuju representasi substantif. Kehadiran perempuan di parlemen bukan hanya soal jumlah, tetapi juga tentang kemampuan mereka mengartikulasikan kepentingan perempuan. Temuan oleh Celis dan Childs (2008) semakin menguatkan bahwa politisi perempuan cenderung membawa isu-isu khas gender ke dalam arena politik. Di Belitung, strategi komunikasi politik berbasis gender ini menyesuaikan dengan kultur lokal yang masih patriarkis, sehingga caleg perempuan lebih mengandalkan pendekatan empatik, personal, dan berbasis pengalaman domestik. Vina Cristyn Ferani, misalnya, menekankan komunikasi *door to door* yang ia yakini efektif membangun kepercayaan secara organik. Isu-isu yang ia bawa dikemas dalam bahasa keseharian yang sederhana, tanpa harus selalu dilabeli sebagai isu gender. Pendekatan serupa juga digunakan oleh Ferliza yang memanfaatkan identitasnya sebagai ibu rumah tangga. Ia menekankan bahwa pengalaman domestiknya membuatnya mampu memahami keresahan perempuan sehari-hari, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga pentingnya pendidikan anak. Sementara itu, Yola Junita mengadopsi strategi simbolik dengan menghubungkan perjuangan politik perempuan Belitung dengan keteladanan tokoh-tokoh perempuan nasional. Ia menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dan membangun citra sebagai agen perubahan sosial.

Mobilisasi isu perempuan ini juga ditopang oleh jaringan sosial dan organisasi perempuan. PKK Kabupaten Belitung menjadi kanal komunikasi tidak langsung yang memperkuat literasi politik perempuan melalui program UMKM, pelatihan keterampilan, dan edukasi berbasis keluarga. Bawaslu turut berkontribusi dengan menginisiasi

pengawasan partisipatif yang melibatkan perempuan, termasuk afirmasi khusus melalui kegiatan pada peringatan Hari Ibu. Dengan demikian, strategi komunikasi politik berbasis gender di Belitung tidak hanya sebatas penyampaian pesan, melainkan juga proses membangun relasi emosional yang menantang konstruksi patriarki di tingkat lokal.

Penguatan citra dan personal branding juga menjadi faktor kunci dalam strategi kampanye. Mengacu pada teori dramaturgi sosial Goffman (1971), politisi dituntut untuk memainkan peran sesuai harapan audiens, sehingga personal branding menjadi sarana penting dalam politik elektoral. Caleg perempuan di Belitung umumnya membangun citra melalui kombinasi identitas sosial, aktivitas komunitas, dan pengalaman domestik. Vina Cristyn Ferani menampilkan dirinya sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat akar rumput dengan keterlibatan dalam komunitas Belitung's Women Club, yang memperlihatkan kapasitas perempuan lintas sektor dalam pendidikan, kesehatan, hukum, dan media. Ferliza memanfaatkan identitasnya sebagai ibu rumah tangga untuk membangun narasi bahwa perempuan biasa pun bisa hadir di parlemen dan menyuarakan aspirasi publik. Yola Junita lebih menekankan citra sebagai figur inspiratif dengan visi kepemimpinan progresif yang mendorong perempuan lain untuk terlibat dalam politik. Organisasi seperti PKK turut memperkuat branding caleg perempuan dengan mendorong mereka tampil sebagai penggerak perubahan sosial melalui isu pemberdayaan ekonomi, literasi keluarga, dan ketahanan pangan. Personal branding semacam ini menjadi instrumen strategis untuk menghadapi stereotip gender sekaligus membangun legitimasi politik di ruang publik yang masih maskulin.

Dari perspektif teori mobilisasi sumber daya (Resource Mobilization Theory), keberhasilan caleg perempuan dalam mengangkat isu gender sangat dipengaruhi oleh akses mereka terhadap sumber daya material, manusia, dan organisasi. Dukungan partai politik menjadi faktor utama, sebagaimana yang terlihat dalam komitmen PDIP yang secara aktif mendorong kader perempuan mengangkat isu stunting, kesehatan ibu-anak, dan pemberdayaan perempuan. Organisasi masyarakat seperti PKK juga berperan signifikan melalui program "Hatinya PKK" yang berfokus pada pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan keluarga. Dukungan kelembagaan lain datang dari Bawaslu yang konsisten memberikan afirmasi khusus terhadap perempuan, salah satunya melalui kegiatan tahunan pada Hari Ibu. Namun, berbagai hambatan juga muncul. Beberapa caleg mengakui keterbatasan sumber daya kampanye, seperti minimnya dana, waktu, dan tenaga, sebagai kendala utama. Hambatan kultural berupa pandangan patriarkis bahwa politik adalah domain

laki-laki juga masih membatasi ruang gerak perempuan. Selain itu, sebagian masyarakat masih memandang isu perempuan hanya sebagai simbol politik tanpa komitmen nyata. Kondisi ini membuat caleg perempuan harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kapasitas politiknya.

Dalam kaitannya dengan partisipasi politik perempuan, temuan penelitian ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks. Pitkin (1967) membedakan representasi formal, deskriptif, substantif, dan simbolik. Keterpilihan tiga caleg perempuan di DPRD Belitung menandai adanya representasi deskriptif, tetapi representasi substantif belum sepenuhnya tercapai karena tidak semua caleg konsisten memperjuangkan isu perempuan. Analisis perilaku pemilih memperlihatkan bahwa daerah dengan basis komunitas perempuan yang kuat cenderung lebih menerima caleg perempuan karena adanya kesamaan pengalaman dan kebutuhan, sementara di daerah dengan dominasi figur laki-laki kampanye berbasis gender sering dipandang skeptis. Walaupun demikian, meningkatnya partisipasi pemilih perempuan dalam kegiatan kampanye menunjukkan adanya pergeseran persepsi. Pemilih perempuan mulai mengidentifikasi dirinya dengan kandidat yang mengangkat isu keseharian, seperti kesehatan reproduksi, pendidikan anak, dan harga kebutuhan pokok.

Jika dianalisis dengan perspektif ekofeminisme Vandana Shiva, sebagian isu yang diangkat caleg perempuan di Belitung memperlihatkan keterkaitan dengan nilai keberlanjutan hidup. Isu stunting, misalnya, tidak hanya terkait dengan kesehatan generasi sekarang tetapi juga keberlangsungan generasi mendatang. Program pemberdayaan ekonomi rumah tangga berbasis komunitas memperlihatkan upaya membangun kemandirian kolektif yang sesuai dengan prinsip ekofeminisme. Akan tetapi, praktik kampanye pragmatis seperti pembagian sembako masih memperlihatkan bahwa nilai-nilai ekofeminisme belum sepenuhnya terinternalisasi dalam strategi politik lokal.

Secara keseluruhan, mobilisasi isu perempuan dalam kampanye politik di Kabupaten Belitung memperlihatkan pola yang unik, di mana isu perempuan hadir tetapi sering bercampur dengan strategi pragmatis umum. Dukungan partai, organisasi masyarakat, dan momentum politik nasional menjadi faktor pendukung utama, sementara keterbatasan sumber daya, bias gender, dan budaya patriarkis masih menjadi penghambat signifikan. Analisis teoritik menunjukkan bahwa politik perempuan di Belitung masih berada pada tahap transisi, dari sekadar keterwakilan jumlah menuju representasi substantif yang lebih bermakna. Dengan demikian, strategi politik caleg perempuan di Belitung mencerminkan pentingnya kombinasi antara representasi deskriptif, strategi personal branding, komunikasi

politik berbasis gender, serta nilai ekofeminisme untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa caleg perempuan terpilih di Kabupaten Belitung secara konsisten mengangkat isu-isu yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari perempuan, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, perlindungan anak dan perempuan, hingga partisipasi politik. Pengangkatan isu-isu tersebut tidak hanya bersifat strategis untuk kepentingan elektoral, melainkan juga lahir dari pengalaman hidup yang dekat dengan realitas sosial komunitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Vandana Shiva bahwa perempuan memiliki pengetahuan dan sensitivitas yang khas karena kedekatannya dengan persoalan hidup sehari-hari, sehingga suara mereka mampu mengungkapkan kebutuhan riil yang sering diabaikan dalam struktur politik patriarkis-kapitalistik. Melalui pendekatan empatik, narasi personal, dan penguatan nilai keperempuanan, caleg perempuan di Belitung menghadirkan bentuk representasi politik yang substantif, mengintegrasikan kepentingan gender dengan keadilan sosial, serta mencerminkan semangat ecofeminism yang menolak dominasi, eksploitasi, dan peminggiran suara perempuan. Mobilisasi isu-isu perempuan dilakukan melalui kombinasi pendekatan personal, struktural, dan kelembagaan dengan dukungan partai politik, organisasi masyarakat seperti PKK, serta afirmasi dari lembaga penyelenggara pemilu. Meskipun dihambat keterbatasan dana kampanye, bias budaya terhadap kepemimpinan perempuan, dan simbolisasi isu gender oleh sebagian partai, strategi kampanye akar rumput serta jaringan sosial berbasis solidaritas perempuan tetap mampu menjadi kunci keberhasilan mereka.

Saran

Partai politik diharapkan tidak hanya memberikan pencalonan, tetapi juga dukungan berkelanjutan berupa peningkatan kapasitas kader perempuan, penyediaan sumber daya kampanye yang adil, serta integrasi isu perempuan ke dalam platform partai. Caleg perempuan sendiri perlu terus membangun jejaring sosial dan politik dengan komunitas akar rumput, memperkuat kapasitas komunikasi politik, serta

mengembangkan strategi kampanye yang inovatif berbasis data dan teknologi agar mampu bersaing dalam arena politik yang kompetitif. Sementara itu, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu diharapkan memperluas program afirmasi dan pendidikan politik sensitif gender, serta menjamin keadilan akses media kampanye bagi caleg perempuan, khususnya di wilayah dengan tantangan sosial-budaya yang masih kuat terhadap representasi perempuan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga memberi dampak substantif dalam mewujudkan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif.

TENTANG PENULIS

Nama Intan Purnama Sari lahir di Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung pada tanggal 1 Mei 2002. Penulis dapat dihubungi melalui email intanfisip0105@gmail.com atau melalui akun Instagram @bubblytann_01. Motto hidup penulis adalah "Sesungguhnya setiap langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan membawa pada keberhasilan besar di kemudian hari."

DAFTAR PUSTAKA

A. Dari Buku

Goffman, Erving. 1971. *The Presentation of Self in Everyday Life*. London: Cox & Wyman Ltd, Pelican Books.

Phillips, A. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press.

Pitkin, Hanna F. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (20th ed.). Alfabeta.

Waylen, G. 2007. *Women's Mobilization and Gender Outcomes in Transitions to Democracy: The Case of South Africa*.

B. Dari Jurnal Dan Skripsi

Akhmad, K. A. 2015. Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *Dutacom*, 9(1), 43.

Celis, Karen, Sarah Childs, Johanna Kantola, dan Mona Lena Krook. 2008. Rethinking Women's Substantive Representation. *Representation*, 44(2).

Farida, M. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.

Kabeer, N. 2012. *Women's Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labour Markets and Enterprise Development* (Vol. 44).

Mansbridge, J. 1999. Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent 'Yes'. *Journal of Politics*.

Patton, M. Q. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: Sage Publications.

Putri, B. M. A., Mudzanatun, M., dan Putri, A. D. S. 2020. Analisis Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pelaksanaan Keterampilan Dasar Mengajar pada Pembelajaran Tematik. *Indonesian Journal of Educational Research and Review*, 3(1), 136–143.

Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Edisi ke-20). Bandung: Alfabeta.

Yuliani, W. 2018. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91.

C. Dari Internet

International IDEA. 2002. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta: Ameepro.

Lestari Moerdijat. 2024. Keterwakilan Perempuan di Parlemen Harus Konsisten Ditingkatkan. Diakses dari: https://www.mpr.go.id/berita/Keterwakilan-Perempuan-di-Parlemen-Harus-Konsisten Ditingkatkan#:~:text=Pada%20Pemilu%202009%2C%20Komisi%20Pemilihan, aktif%20dalam%20organisasi/lembaga%20politik.&text=Anggota%20Terkait%20

Nazriel. 2024. Ada Tiga Srikandi di DPRD Belitung 2024–2029, Siap Perjuangkan Aspirasi Perempuan.